

SINERGI ASEAN OUTLOOK ON INDO-PACIFIC DENGAN FREE AND OPEN INDO-JEPANG DALAM BIDANG PERTAHANAN UNTUK MENCIPTAKAN KAWASAN INDO-PASIFIK YANG AMAN DAN STABIL

RR Zahroh Hayati Azizah

Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Email: rrazizah14@gmail.com

Yoedhi Swastanto

Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Email: yoedhiwastanto83@gmail.com

Beni Rudiawan

Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Email: benirudiawan3287@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan Indo-Pasifik beberapa dekade belakangan ini menjadi pusat konstalasi politik keamanan dunia. Kawasan Indo-Pasifik memiliki lingkungan strategis baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan yang menarik perhatian berbagai aktor internasional. Berbagai negara dan organisasi internasional mulai mengarahkan kebijakan luar negerinya terhadap kawasan ini. ASEAN menginginkan kawasan ini aman dan stabil demi menciptakan lingkungan kawasan yang baik bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Sedangkan Jepang juga menginginkan kawasan ini aman dan stabil terutama menjaga kedaulatan negaranya dan kelancaran jalur perdagangan dan pelayaran laut untuk distribusi impor energi dari berbagai negara. Oleh karena itu sinergi kedua aktor untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang aman dan damai merupakan hal yang penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan desain penelitian studi kasus. Data-data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori-teori antara lain *Regional Security Complex Theory* (RSCT), teori sinergi, dan teori diplomasi pertahanan. Output yang diperoleh adalah terwujudnya sinergi *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* dengan *Free and Open Indo-Pacific* Jepang yang mendukung terciptanya kawasan Indo-Pasifik yang aman dan stabil.

Kata kunci: Sinergi, ASEAN, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, Jepang, Free and Open Indo-Pacific, Indo-Pasifik

ABSTRACT

The Indo-Pacific region in recent decades has become the center of world security political constellations. The Indo-Pacific region has a strategic environment in terms of economic, social, political and security that attracts the attention of various international actors. Various countries and international organizations began to direct their foreign policies towards this region. ASEAN wants this region to be safe and stable in order to create a good regional environment for the economic growth of ASEAN countries. Meanwhile, Japan also wants this region to be safe and stable, especially to maintain the sovereignty of its country and smooth sea trade and shipping routes for the distribution of energy imports from various countries. Therefore, the synergy of the two actors to create a safe and peaceful Indo-Pacific region is important. This study uses qualitative methods and a case study research design.

The data were obtained through interviews and literature studies to be further analysed using theoretical approaches including Regional Security Complex Theory (RSCT), synergy theory, and defence diplomacy. The output obtained is the realization of the synergy of the ASEAN Outlook on Indo-Pacific with Free and Open Indo-Pacific Japan which supports the creation of a safe and stable Indo-Pacific region.

Keywords: Sinergy, ASEAN, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, Japan, Free and Open Indo-Pacific, Indo-Pacific

PENDAHULUAN

Beberapa dekade terakhir, kawasan Indo-Pasifik menjadi pusat politik keamanan dunia. Hal ini dapat dilihat dari perubahan arah strategi dan kebijakan mayoritas negara-negara adidaya terhadap kawasan ini. Perubahan arah strategi negara-negara tersebut terhadap kawasan ini dikarenakan kawasan ini memiliki perkembangan lingkungan strategis yang semakin hari semakin kompleks. Lingkungan strategis dapat dilihat dari segi sosial, ekonomi, geopolitik, serta keamanan.

Dilihat dari segi sosial kawasan Indo-Pasifik merupakan rumah bagi negara terpadat di dunia, demokrasi terpadat, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, serta jumlah populasi penduduk setengah dari populasi dunia (The Department of Defense, 2019). Kemudian dari segi ekonomi, dengan banyaknya jumlah penduduk di kawasan, membuat kawasan Indo-Pasifik menyumbang dua pertiga dari pertumbuhan global dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyumbang 60 persen dari PDB global. Kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan ekonomi terbesar di dunia dengan adanya negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Cina, dan Jepang. Serta enam negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat seperti India, Kamboja, Laos, Myanmar, Nepal, dan Filipina. Sembilan dari sepuluh pelabuhan tersibuk di dunia berada di kawasan ini. Enam puluh persen dari perdagangan maritim dunia melewati kawasan Asia, yang mana sepertiganya melewati kawasan Laut Cina Selatan (LCS) (The Department of Defense, 2019).

Sedangkan dari segi geopolitik, kawasan Indo-Pasifik merupakan rumah bagi negara-negara besar maupun organisasi internasional dan cukup diperhitungkan baik dari ekonomi maupun militer. Diantaranya AS, Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, India, Australia, serta negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN). Kemudian dari segi keamanan, kawasan Indo-Pasifik memiliki berbagai isu strategis yang dapat menjadi ancaman

bagi negara-negara di kawasan maupun di luar kawasan. Isu keamanan strategis tersebut diantaranya terkait sengketa kedaulatan di Laut Cina Selatan (LCS) dan Laut Cina Timur (LCT); Perang di Semenanjung Korea; kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara, Pakistan, India, Cina, Rusia, dan Australia; konflik dalam negeri negara-negara di kawasan, seperti yang dialami Myanmar; pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19); terorisme; keamanan maritim; serta perubahan iklim. Perkembangan berbagai lingkungan strategis tersebut membuat kawasan ini sarat akan peluang sekaligus tantangan.

Berbagai macam strategi politik luar negeri telah diterapkan oleh negara-negara di dunia terhadap kawasan Indo-Pasifik. Strategi politik luar negeri tersebut mulai dari konfrontasi hingga kerja sama. Konfrontasi yang terlihat jelas adalah adanya persaingan hegemoni antara AS dengan Cina terhadap kawasan ini. Persaingan kedua negara adidaya ini diikuti dengan dikerahkannya armada militer mereka dan negara aliansinya di kawasan Indo-Pasifik. Tidak jarang negara-negara tersebut melakukan latihan atau operasi gabungan yang kemudian memicu reaksi dari kubu lawan sehingga menimbulkan ketegangan di kawasan. Persaingan kedua negara adidaya tersebut tidak hanya persoalan militer namun juga ekonomi. Perang dagang antara AS dan Cina juga tidak dapat dihindari. Kedua negara bertarung memperebutkan pasar, terutama kawasan Indo-Pasifik yang memiliki jumlah penduduk setengah dari populasi dunia.

Di lain sisi terdapat pula pola kerja sama yang terbentuk di kawasan ini. Kerjasama yang dilakukan bisa dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral. Pola kerja sama terjadi antara negara-negara yang lemah untuk saling mendukung satu sama lain di tengah konstelasi politik negara adidaya. Pola kerja sama ini terjalin antar negara-negara Asia Tenggara melalui ASEAN. Pola kerja sama yang lain terjadi antara negara yang lemah dengan negara yang lebih kuat. Hal ini dilakukan untuk menambah akumulasi kekuatan mereka baik dari sisi *hard power* maupun *soft power*. Misalnya kerja sama yang terjalin antara Filipina dengan AS. Kemudian ada pula pola kerja sama antara negara-negara dengan kekuatan yang besar. Seperti kerja sama AS dengan negara aliansinya dalam Quadrilateral/QUAD (India, Jepang, Australia) dan AUKUS (Australia dan Inggris). Baik kerja sama maupun konfrontasi keduanya dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional negara masing-masing terhadap kawasan Indo-Pasifik

Salah satu kerjasama yang terbentuk adalah sinergi ASEAN dan Jepang terhadap kawasan Indo-Pasifik. ASEAN sebagai organisasi internasional regional di Asia Tenggara merupakan aktor penting di kawasan Indo-Pasifik karena keberadaannya yang tepat di tengah kawasan Indo-Pasifik dan keaktifannya dalam menangani berbagai persoalan kawasan maupun internasional. Sebagai organisasi yang terletak di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik, ASEAN tentu menerapkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menghadapi situasi di kawasan.

Sedangkan Jepang sebagai salah satu negara di kawasan Indo-Pasifik juga menaruh perhatian terhadap kawasan ini. Jepang memiliki kekuatan yang cukup berpengaruh baik di kawasan maupun di dunia. Ekonomi Jepang berada pada urutan ketiga terbesar di dunia setelah AS dan Cina. Kekuatan ekonomi Jepang berasal dari industri manufaktur terutama otomotif, perobotan, dan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, n.d.). Dalam bidang pertahanan, sejak kekalahan pada Perang Dunia II Jepang tidak diperbolehkan memiliki militer sehingga militer hanya bersifat defensif dan melarang militer untuk bersifat ofensif kepada pihak luar. Oleh karena itu angkatan bersenjata Jepang tetap ada dengan nama *Japan Self Defense Force (JSDF)* atau Tentara Bela Diri Jepang yang digunakan untuk kepentingan defensif.

Namun, beberapa tahun terakhir, dalam rangka menghadapi perkembangan situasi kawasan terutama sikap asertif Cina dan perkembangan senjata nuklir Korea Utara yang dapat mengganggu kepentingan nasionalnya, Jepang mulai meningkatkan kekuatannya, terutama sejak pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Bahkan kekuatan militer Jepang berada dalam urutan kelima terbesar di dunia. Hal tersebut didukung oleh peningkatan anggaran pertahanan Jepang yang bertujuan untuk mendukung penguatan sistem pertahanan Jepang di seluruh wilayah agar mampu menghadapi ancaman dari luar terutama di daerah perbatasan seperti Pulau Senkaku. Peningkatan anggaran tersebut juga digunakan untuk pengembangan alaphankam dan transportasi bagi JSDF (Purwaka, 2018). Besarnya kekuatan ekonomi dan militer Jepang, serta keinginan Jepang untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera menjadi bekal bagi ASEAN untuk melakukan kerja sama dengan Jepang dalam bidang pertahanan terutama menghadapi situasi di kawasan Indo-Pasifik. Sinergi AOIP dan FOIP tentu menjadi usaha yang nyata bagi negara-negara di kawasan

dalam menciptakan tatanan kawasan yang aman dan stabil. Namun dalam pelaksanaannya terdapat tantangan yang muncul. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Peneliti akan membahas mengenai sinergi AOIP dan FOIP Jepang serta tantangan atau kendala yang muncul dalam sinergi tersebut. Penelitian ini berfokus pada tahun 2016-2022. Tahun 2016 adalah tahun Jepang memperkenalkan FOIP, sedangkan tahun 2022 Peneliti melakukan penelitian yang mana sinergi kedua konsep tersebut masih dilakukan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Teori Kompleksitas Keamanan Regional

Pada dasarnya Teori Kompleksitas Keamanan Regional atau *Regional Security Complex Theory* ini merupakan perpaduan asumsi realisme dan konstruktivisme (Barry Buzan & Ole Wavner, 2003). Asumsi yang diambil dari realisme yaitu tentang adanya polaritas, *power*, dan sistem. Menurut Buzan (2003) polaritas tidak hanya dapat dianalisis dalam level internasional namun juga dalam level kawasan maupun sub-kawasan. Sistem dalam hal ini adalah kawasan itu sendiri, dan negara sebagai unitnya. Sedangkan *power* bagi negara merupakan hal yang penting, karena menentukan tingkat ketahanan negara tersebut dalam sebuah sistem. Distribusi *power* yang tidak seimbang antar negara di kawasan dapat menimbulkan hubungan yang konfliktual. Sedangkan asumsi yang diambil dari konstruktivisme yaitu mengenai identitas. Identitas merupakan salah satu variabel dalam konstruksi sosial dimana menjadi penentu negara dalam berperilaku dan berinteraksi di kawasan. Kedua aliran tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Teori kompleksitas keamanan regional merupakan salah satu teori keamanan yang membantu suatu negara dalam menganalisa perkembangan dan interaksi antar negara-negara yang saling terkoneksi satu dengan yang lain di dalam sebuah kawasan. Menurut Shaun Breslin (2010) kawasan bukanlah kesatuan unit-unit berdasarkan kedekatan geografis saja, namun juga unsur lain yang mendukung pembentukan identitas bersama antar unit tersebut sebagai sebuah kawasan. Unsur lain dapat berupa budaya, ekonomi, bahasa, hubungan politik, maupun unsur pendukung lainnya.

Menurut Buzan dan Wavner (2003), persoalan mengenai keamanan negara-negara di kawasan berhubungan erat satu sama lain, oleh karena itu permasalahan mengenai keamanan

nasional suatu negara tidak mungkin tanpa memperhitungkan mengenai keamanan kawasan. Meskipun terdapat hubungan interdependensi atau saling ketergantungan antar negara-negara di suatu kawasan namun bukan berarti keadaan akan selalu harmonis, mengingat hubungan antar negara dipengaruhi berbagai macam hal seperti perimbangan kekuatan, aliansi dengan negara lain serta masuknya suatu kekuatan eksternal di dalam kawasan tersebut. Teori kompleksitas keamanan regional membagi pola interaksi antar negara menjadi dua, yaitu *amity* dan *enmity*. *Amity* adalah pola hubungan antar negara yang didasari oleh hubungan pertemanan yang kemudian menjadi lebih baik, bersifat kooperatif atau kerja sama. Sedangkan *enmity* adalah pola hubungan antar negara yang didasari rasa saling curiga sehingga bersifat konfliktual atau bermusuhan (Barry Buzan & Ole Wavier, 2003). Teori RSCT ini membantu menganalisis situasi dan kondisi di kawasan Indo-Pasifik, serta pola *amity* dan *enmity* yang ada di kawasan Indo-Pasifik.

Teori Sinergi

Sinergi berasal dari bahasa Yunani, *Sinergos*, yang artinya merupakan interaksi atau kerja sama antar 2 (dua) kelompok atau lebih, yang memadukan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Menurut Hampden-Turner (1990) aktivitas sinergi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas, yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Sinergi merupakan hasil dari suatu relasi dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan.

Covey (1989) mengatakan bahwa istilah sinergistik dalam suatu hubungan komunikasi terbentuk dari integrasi antara semangat kerja sama dan hubungan saling percaya yang bertaraf tinggi. Pengertian sinergi ini dapat disamakan sebagai suatu perkembangan kreativitas yang dibangun secara bersama dari rasa saling percaya dan semangat kerja sama yang sangat tinggi, hingga kedua belah pihak akan mampu menyatakan dengan terbuka gagasan dan pendapat masing-masing, tanpa merasa diri mereka terancam dan khawatir dengan kemungkinan konflik yang terjadi. Komunikasi yang sinergistik dibangun dari suatu bentuk keberanian dan ketegasan, dengan sekaligus konsiderasi yang tinggi. Makin relevan dan signifikan permasalahan yang menjadi fokus dalam hubungan kerjasama itu, maka sinergi yang dihasilkannya akan lebih bermakna pula untuk kepentingan organisasi.

Najianti dalam Rahmawati dkk (2014) menjelaskan bahwa merupakan kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar ketika dibangun secara baik bersama *stakeholders'* yang ada didalamnya. Tujuannya untuk membangun masyarakat atas kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka dan demokratis. Untuk mencapai sinergitas dapat menggunakan dua cara, yaitu komunikasi dan koordinasi. Cara menghasilkan sinergi, maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik antar pihak yang bersinergi.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sinergi adalah interaksi atau kerja sama antar dua kelompok atau lebih yang terbentuk dari integrasi antara semangat kerja sama dan hubungan saling percaya yang bertaraf tinggi yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dengan berlandaskan pada komunikasi dan koordinasi yang baik antar pihak yang bersinergi. Teori ini membantu menganalisis sinergi antara AOIP dengan FOIP Jepang.

Teori Diplomasi Pertahanan

Diplomasi adalah bagian dari pelaksanaan hubungan internasional itu sendiri. Diplomasi merupakan pelaksanaan hubungan antar negara berdaulat yang dilakukan oleh pejabat resmi yang berada di dalam atau luar negeri sebagai anggota layanan diplomatik negara atau diplomat sementara (Berridge, G. R., & Lloyd, L., 2012). Barston (2014) mengatakan diplomasi merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan manajemen pada suatu hubungan antar negara dan aktor lainnya. Pada sudut pandang sebuah negara, diplomasi berkaitan dengan nasihat, membentuk dan mengimplementasikan sebuah kebijakan luar negeri. Seperti tindakan formal suatu negara maupun perwakilan dan serta aktor-aktor lain, artikulasi, koordinasi dan menjaga kepentingan yang khusus maupun luas, melalui tindakan surat-menyurat, pembicaraan rahasia, pertukaran pandangan, melakukan lobi, kunjungan kenegaraan, ancaman dan aktivitas yang terkait.

Diplomasi mengalami perkembangan, salah satunya dengan munculnya konsep diplomasi pertahanan. Menurut Cheyre (2013) diplomasi pertahanan merupakan penggunaan sumber daya pertahanan di masa damai dan tanpa tekanan eksternal untuk mencapai tujuan nasional, terutama dalam hubungan antar negara. Cottey & Forster (2004, p. 6) juga menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan dapat juga diartikan ketika angkatan bersenjata dan infrastruktur pertahanan lain terutama Kementerian Pertahanan digunakan dalam masa damai

sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan negara. Dapat diartikan pula bahwa diplomasi pertahanan yaitu perkembangan pada bidang militer, dimana militer tidak lagi pada tugas tradisionalnya yang biasanya membangun hubungan kerjasama pertahanan dengan negara aliansinya, melainkan terhadap negara non aliansinya juga dapat dilakukan kerjasama pertahanan.

Menurut Winger (2014) diplomasi pertahanan muncul sebagai tren baru, dimana diplomasi pertahanan difungsikan sebagai elemen *soft power* dalam militer yang dilaksanakan secara langsung atau melalui penyelenggaraan aktivitas-aktivitas militer. *Soft power* menurut Joseph Nye (2005) merupakan kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan lebih mengedepankan daya tarik daripada menggunakan tindakan koersif atau dengan mengeluarkan biaya. Tujuan *soft power* adalah untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara dan dilakukan melalui kerjasama dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Oleh karena itu, menurut Winger (2014) diplomasi pertahanan merupakan salah satu bentuk *soft power* dimana diplomasi pertahanan diartikan sebagai penggunaan pertahanan secara damai lembaga satu negara untuk mengkooptasi lembaga pemerintah negara lain dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan.

Cottey dan Forster (2004) membagi tujuan diplomasi pertahanan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Strategic Engagement*

Diplomasi pertahanan digunakan untuk mencegah terjadinya konflik melalui kerja sama dan asistensi militer. Kerja sama dan asistensi militer tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan aliansi, namun lebih ditujukan untuk menciptakan hubungan kerja sama dengan lawan politik atau yang memiliki kemungkinan dapat menjadi lawan politik di masa depan yang tujuannya untuk mencegah terjadinya konflik. Pencegahan konflik tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan tanda dan komitmen untuk mengembangkan hubungan kerja sama
- b. Mempromosikan transparansi militer dan mengurangi kesalahpahaman
- c. Mengenalkan dan persamaan persepsi untuk kepentingan bersama
- d. Mengubah pola pikir rekan kerja sama militer
- e. Mensosialisasikan kerja sama militer

f. Asistensi pertahanan

2. *Promoting Democratic Civil-Military Relations*

Diplomasi pertahanan bertujuan untuk mencegah kembalinya terhadap sikap otoriter. Teknis praktis dan asistensi militer digunakan untuk pengembangan institusi dan norma yang demokratis. Diplomasi pertahanan dapat membantu dalam mengenalkan *democratic civil military relations* di beberapa jumlah area spesifik, yaitu:

- a. Pengendalian politisi sipil terhadap militer. Misalnya adanya Dewan Keamanan Nasional, Kementerian Pertahanan, atau semacamnya)
- b. Pengendalian demokratis sipil terhadap kebijakan pertahanan. Misalnya Kementerian Pertahanan
- c. *Legislative/parliamentary oversight* yaitu melibatkan peranan *legislative* dan parlementer dalam mengawasi kebijakan pertahanan, untuk mengurangi peluang terjadinya kelalaian dalam pembuatan kebijakan
- d. Peraturan hukum, kemanusiaan dan keadilan yaitu memastikan ketundukan kebijakan pertahanan terhadap peraturan yang menyangkut hukum, menghormati perihal kemanusiaan dan keadilan.
- e. Keterkaitan Lembaga sipil yaitu melibatkan transparansi militer dan kebebasan dalam informasi militer, anggaran pertahanan dan pasukan bersenjata terhadap, lembaga penelitian, advokasi *think-tank*, kelompok kampanye, dan independensi media yang memiliki keahlian di bidang pertahanan.

3. *Enhancing Peacekeeping Capabilities*

Diplomasi pertahanan bertujuan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam menjaga perdamaian. Penggunaan militer tidak hanya secara langsung mengenai usaha untuk melawan musuh eksternal maupun internal, tetapi lebih kepada masalah perdamaian yang lebih umum, yang memiliki tujuan meningkatkan *confidence building* dan menduduki posisi yang memiliki tujuan untuk mempromosikan nilai demokrasi, *good governance*, serta isu kemanusiaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Catherine Marshal (1995) pendekatan kualitatif merupakan suatu proses yang

mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian menggunakan desain studi kasus, dimana Peneliti mengeksplorasi sinergi AOIP dengan FOIP Jepang, serta peluang dan tantangannya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan dan wawancara dan studi Pustaka. Wawancara dilakukan terhadap akademisi dalam bidang hubungan internasional terutama persoalan politik dan keamanan. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan menelaah sumber data berupa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah Indo-Pasifik dan sinergi AOIP dengan FOIP Jepang. Peneliti menggunakan teknik analisis data Model Interaktif milik Miles, Huberman, dan Saldana. Dalam teknik analisis Model Interaktif ini memiliki empat tahapan yaitu *data collection*, *data condensation*, *data display*, dan *conclusion/verification* (Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J., 2014).

PEMBAHASAN

Sejarah Hubungan ASEAN dan Jepang

Hubungan Jepang dengan ASEAN dimulai dengan hubungan dialog informal pada tahun 1973 yang kemudian meningkat menjadi hubungan formal dengan dibentuknya mekanisme *ASEAN-JAPAN Forum* pada tahun 1977 (ASEAN, 2021). Semenjak itu, hubungan ASEAN-Jepang terus berlanjut di berbagai bidang baik politik, ekonomi, maupun pertahanan. Dalam bidang ekonomi negara-negara ASEAN menjadi kawasan tujuan ekspor produk Jepang, investasi, dan sumber bahan baku bagi industri Jepang. Oleh karena itu hubungan ASEAN dan Jepang sangat erat terutama dalam bidang perdagangan, penanaman investasi *Foreign Direct Investment* (FDI), dan pemberian bantuan pembangunan *Official Development Aid* (ODA) bagi negara-negara anggota ASEAN.

Sementara dalam bidang politik dan keamanan, Jepang turut berperan dalam menciptakan perdamaian di kawasan. Diantaranya dalam konflik Vietnam dan Kamboja, Jepang turut mengirimkan 1800 tentaranya untuk bergabung dengan Persarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk ditempatkan di daerah konflik tersebut serta menjadi mediator dalam proses penarikan tentara Vietnam di Kamboja dengan mengajak dialog Vietnam. Dalam dialog tersebut Jepang menawarkan bantuan ekonomi dengan syarat penarikan tentara Vietnam di Kamboja (Sudo, 1988).

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe tahun 2016, Jepang mengerahkan inisiatif pertahanan pertamanya di kawasan Asia Tenggara dengan nama *Vientiane Vision*. Inisiatif ini dimaksudkan sebagai jalur bagi Jepang untuk meningkatkan aspek pertahanan dalam hubungannya dengan negara-negara ASEAN untuk membangun hubungan bilateral dengan negara-negara tersebut, yang juga menjadi bagian dari pendekatan Indo-Pasifik Jepang itu sendiri. Dalam inisiatif tersebut Jepang dan negara-negara di Asia Tenggara melakukan berbagai agenda seperti latihan bersama, bantuan pengembangan kapasitas, pertukaran akademik, program pembangunan manusia, serta kerjasama industri pertahanan.

Pada tahun 2019 diluncurkan *Vientiane Vision 2.0* pada pertemuan informal Menteri Pertahanan Jepang dan Menteri Pertahanan negara-negara anggota ASEAN di Bangkok, Thailand. *Vientiane Vision 2.0* merupakan lanjutan dari visi yang pertama dengan memfokuskan kerjasama pertahanan pada dalam memastikan supremasi hukum, memperkuat keamanan maritim, dan isu ancaman non-tradisional (Parameswaran, *Vientiane Vision 2.0 Puts Japan's Asia Security Role into Focus*, 2019).

Sinergi Jepang dengan ASEAN dalam bidang politik dan keamanan tercermin dalam berbagai forum dialog seperti KTT ASEAN-Jepang, Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Pejabat Senior dan ahli. Selain itu, Jepang juga terlibat dalam berbagai mekanisme ASEAN diantaranya *ASEAN-Japan Strategic Partnership*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *ASEAN Plus Three (APT)*, *the East Asia Summit (EAS)*, and *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus)*, and *the Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)* (ASEAN, 2021).

ASEAN memberikan perhatian yang besar terhadap kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya AOIP pada tahun 2019 yang pada awalnya diinisiasi oleh Indonesia. Outlook ASEAN ini menjadi landasan bagi ASEAN untuk menyikapi berbagai persoalan di kawasan Indo-Pasifik (ASEAN, 2019). Jepang juga memiliki inisiatif serupa yang dinamakan dengan visi FOIP. Konsep ini dikeluarkan pada tahun 2016 oleh Perdana Menteri Shinzo Abe yang digunakan sebagai panduan Jepang terhadap kawasan Indo-Pasifik (Sahashi, 2019). Baik ASEAN maupun Jepang memiliki konsep sendiri untuk menyikapi situasi dan persoalan di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun demikian, ASEAN dan Jepang tetap melakukan kerjasama dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pertahanan. Dalam bidang pertahanan ASEAN dan Jepang bekerjasama menangani persoalan keamanan maritim, bencana alam, terorisme,

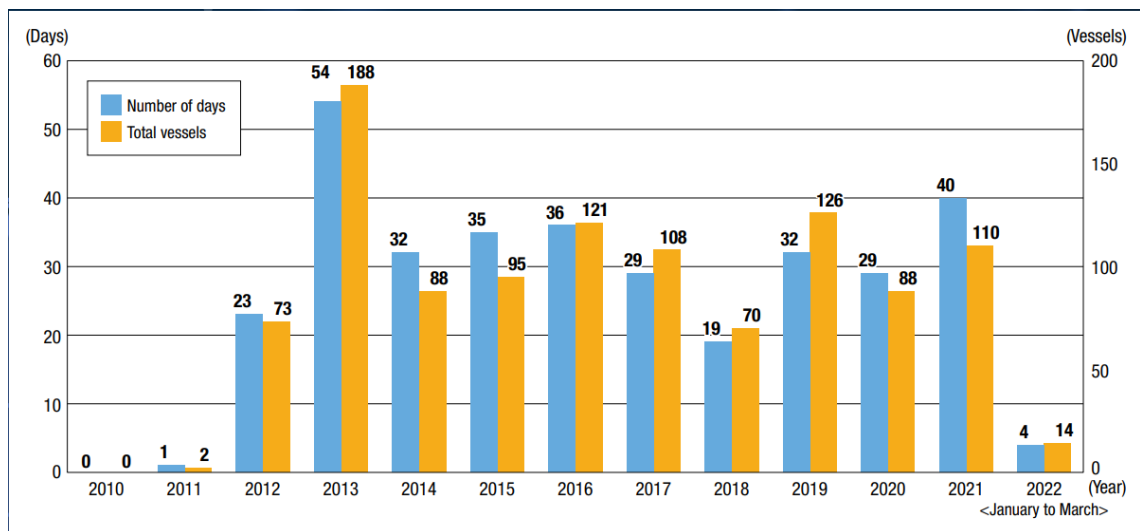
perdagangan ilegal, kejahatan siber, dan bidang-bidang lainnya. Keberadaan kerjasama antara ASEAN dan Jepang terutama dalam bidang pertahanan tentu membawa pengaruh bagi kawasan Indo-Pasifik.

Sinergi ASEAN Outlook on Indo-Pacific dengan Free and Open Indo-Pacific Jepang

Semakin hari kawasan Indo-Pasifik menjadi primadona bagi aktor internasional. Semakin banyak negara-negara dan organisasi internasional yang membuat kebijakan terhadap kawasan ini, termasuk ASEAN dan Jepang. Kedua aktor ini merupakan pemain yang aman penting bagi kawasan. Pada tahun 2016 Jepang mengeluarkan strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang belakangan berubah menjadi sebuah visi. FOIP ini pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2016 (Sahashi, 2019). Tujuan utama Jepang membentuk FOIP ini adalah untuk meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan kawasan dengan meningkatkan konektivitas antara benua Asia dan Afrika melalui kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (Japan Ministry of Defense, 2020). Dalam konsep tersebut Jepang menggunakan berbagai pendekatan untuk menciptakan lingkungan keamanan kawasan Indo-Pasifik yang menguntungkan.

Berdasarkan wawancara dengan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, kepentingan nasional Jepang di kawasan Indo-Pasifik adalah pertama bahwa Jepang membutuhkan sumber energi dan bahan pokok dari berbagai negara. Yang mana sumber energi dan bahan pokok tersebut didistribusikan melalui jalur laut. Oleh karena itu keamanan jalur laut ini sangatlah penting. Yang kedua yaitu untuk menjaga kedaulatan Jepang, terutama atas Pulau Senkaku/Diaoyu yang menjadi sengketa dengan Cina. Aktivitas Cina di pulau tersebut semakin tinggi dari masa ke masa. Maka sangat penting bagi Jepang untuk mengamankan kedaulatan negaranya atas pulau tersebut. Berikut adalah tabel jumlah intrusi yang dilakukan *China Coast Guard* dan kapal-kapal Cina yang memasuki wilayah Pulau Senkaku/Diaoyu.

Gambar 1. Jumlah Intrusi yang dilakukan China Coast Guard dan kapal-kapal Cina yang memasuki wilayah Pulau Senkaku/Diaoyu



Sumber: (Ministry of Defense of Japan, 2022).

Kemudian kepentingan yang ketiga yaitu bahwa pengaruh AS di kawasan sedikit menurun, sedangkan pengaruh Cina semakin meningkat. Maka Jepang harus bisa mengandalkan dirinya sendiri dan memperbanyak kerjasama dengan negara lain demi terciptanya kawasan yang aman dan stabil. Termasuk dengan Cina dalam hal ekonomi. Cina merupakan partner ekonomi terbesar bagi Jepang (OEC, 2020).

Dalam dokumen yang berjudul *Free and Open Indo-Pacific* yang dirilis Kementerian Luar Negeri Jepang juga dijelaskan bahwa kawasan Indo-Pasifik menghadapi berbagai tantangan seperti pembajakan, terorisme, proliferasi WMD, bencana alam, dan upaya mengubah *status quo*. Dalam keadaan seperti itu, Jepang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di seluruh kawasan untuk menjadikan Indo-Pasifik bebas dan terbuka sebagai "*international public good*", dengan memastikan tatanan internasional berbasis aturan termasuk supremasi hukum, kebebasan navigasi dan penerbangan, penyelesaian sengketa secara damai, dan promosi perdagangan bebas (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2022). Berdasarkan wawancara dan dokumen tersebut, dapat dilihat bahwa kepentingan nasional Jepang di kawasan Indo-Pasifik menyangkut persoalan pertahanan, ekonomi, dan tatanan kawasan yang aman dan stabil.

Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut, Jepang menjalin berbagai kerja sama. Kerja sama dilakukan baik bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara dan organisasi internasional dengan mempertimbangkan karakteristik dan situasi dari setiap wilayah dan negara. Jepang secara aktif menggunakan kemampuan pertahanannya serta melaksanakan kerja sama pertahanan dengan berbagai negara termasuk pelatihan dan latihan bilateral maupun multilateral, kerja sama peralatan dan teknologi pertahanan, maupun kegiatan pertukaran jasa-jasa terkait bidang pertahanan (Japan Ministry of Defense, 2020). Meskipun fokus visi tersebut ditujukan untuk kawasan Indo-Pasifik, namun kerja sama yang dibangun Jepang tidak hanya dengan negara dan organisasi internasional di kawasan tersebut saja. Jepang juga menjalin kerja sama dengan negara di luar kawasan seperti negara di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa.

Pada tahun 2018 Indonesia mulai membawa konsep Indo-Pasifik ke ranah ASEAN. ASEAN merupakan organisasi pemerintah di kawasan Asia Tenggara yang juga merupakan subkawasan sentral bagi kawasan Indo-Pasifik. Dengan negosiasi yang dilakukan berbulan-bulan pada akhirnya Indonesia dapat mengantarkan ASEAN dalam pembentukan AOIP tahun 2019 yang kemudian diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN. Berdasarkan AOIP, kawasan Indo-Pasifik adalah kawasan yang mencakup Asia Pasifik dan Samudra Hindia (ASEAN, 2019). *Outlook* ini menegaskan pandangan bersama ASEAN terhadap kawasan Indo-Pasifik dan posisi tidak memihak ASEAN terhadap persaingan kekuatan-kekuatan besar yang ingin memperebutkan pengaruh di kawasan ini (Roza, 2019).

Berdasarkan visi FOIP Jepang menganggap ASEAN sebagai inti di kawasan. Jepang sangat mementingkan sentralitas dan persatuan ASEAN, serta membawa perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik dengan memastikan tatanan internasional berbasis aturan. Jepang sangat yakin bahwa kerjasama Jepang-ASEAN memiliki banyak potensi untuk mencapai visi tersebut. Oleh karena itu disepakatilah *Joint Statement of the 23rd ASEAN-Japan Summit on Cooperation on ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* di Hanoi, Vietnam pada 12 November 2020 yang kemudian menjadi landasan kerjasama ASEAN dan Jepang dalam menyikapi perkembangan isu di kawasan Indo-Pasifik (BRIN, 2021).

Dalam *joint statement* atau landasan kerja sama tersebut keduanya berkomitmen untuk mendukung pembangunan komunitas ASEAN dan meningkatkan Kemitraan Strategis

ASEAN-Jepang untuk perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Penguatan kemitraan strategis ASEAN-Jepang dilakukan dengan kerja sama praktikal dan sinergi dalam empat bidang sesuai dengan AOIP, yaitu: kerja sama maritim, konektivitas, *UN Sustainable Development Goals 2030*, dan ekonomi, serta bidang-bidang lainnya (ASEAN, 2021). Dengan keberadaan *Joint Statement* ASEAN dan Jepang tentang kerja sama di kawasan Indo-Pasifik tentu menguatkan kerjasama ASEAN dan Jepang baik dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Dengan adanya sinergi ASEAN dan Jepang di kawasan ini, menunjukkan bahwa kedua aktor memiliki rasa saling percaya satu sama lain dan semangat kerja sama yang sangat tinggi, hingga kedua belah pihak mampu menyatakan dengan terbuka gagasan dan pendapat masing-masing, tanpa merasa diri mereka terancam dan khawatir dengan kemungkinan konflik yang terjadi.

Sinergi AOIP dan FOIP sebagai *Strategic Engagement*

Sinergi AOIP dengan FOIP bertujuan untuk mencapai *strategic engagement* atau kerjasama strategis antara ASEAN dengan Jepang. *Strategic engagement* digunakan sebagai usaha untuk mencegah terjadinya konflik, melalui kerjasama dan asistensi militer. Paska Outlook ASEAN disepakati pada tahun 2019, Jepang yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya menyambut baik Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik serta menghargai kepemimpinan Indonesia di kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Pertemuan Bilateral dengan Menlu Jepang, Taro Kono, di Osaka tanggal 27 Juni 2019 (Kemlu RI, 2019). Kemudian negara-negara ASEAN dan Jepang juga telah menyampaikan komitmen mereka untuk memperkuat kemitraan strategis ASEAN-Jepang melalui *Joint Statement of the 23rd ASEAN-Japan Summit on Cooperation on ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (ASEAN, 2020).

Untuk mendukung kerjasama strategis yang konkrit dalam sinergi AOIP dengan FOIP, negara-negara anggota ASEAN dan Jepang melakukan berbagai upaya. Salah satunya Indonesia yang terus mendorong terlaksanakannya kerja sama nyata antara ASEAN dengan Jepang. Dalam Pertemuan 2+2 tahun 2021, keempat Menteri telah menyepakati bahwa AOIP dan FOIP berbagi banyak prinsip yang fundamental dan kedua negara akan mendorong kerja sama yang nyata sebagai "mitra strategis" yang berbagi nilai-nilai dasar yang sama demi mewujudkan FOIP dan AOIP.

Dalam Pertemuan *ASEAN-Japan Ministerial Meeting*, Phnom Penh, Agustus 2020, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi kembali menyampaikan bahwa Indonesia mengharapkan kiranya kerja sama konkret yang saling menguntungkan dan inklusif di Indo-Pasifik dapat dikedepankan dalam kemitraan ASEAN-Jepang di masa mendatang. Menlu RI juga menyampaikan bahwa ASEAN telah memiliki AOIP dengan memberikan prioritas pada 4 bidang kerjasama yaitu: maritime, konektivitas, pencapaian SDGs dan perdagangan investasi. Kerjasama konkret dan inklusif ini diharapkan dapat berkontribusi pada perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan Indo-Pasifik. (Kemlu RI, 2022).

Sinergi AOIP dengan FOIP dalam bidang pertahanan secara nyata dapat dilihat dari diluncurkannya forum yang bernama "Vientiane Vision: Japan's Defense Cooperation Initiative With ASEAN" oleh Jepang. *Vientiane Vision* ini merupakan prinsip panduan untuk kerja sama pertahanan Jepang dengan ASEAN yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan Inada pada Pertemuan Informal Menteri Pertahanan ASEAN-Jepang kedua yang diadakan di Vientiane, Laos pada 16 November 2016 (Ministry of Defense of Japan, 2016). Tujuan dibuatnya *Vientiane Vision* adalah untuk meningkatkan Kemitraan Strategis Jepang dengan ASEAN dan berkontribusi pada sentralitas dan persatuan ASEAN dengan mendukung ketahanannya. Forum tersebut disambut baik oleh semua negara anggota ASEAN, serta para Menteri Pertahanan ASEAN sepakat untuk lebih meningkatkan kerja sama pertahanan antara Jepang dan ASEAN.

Dalam pertemuan ASEAN-Japan Defense Ministers Informal Meeting, pada tanggal 19 November 2019 di Bangkok, Thailand, Jepang kembali meluncurkan sequel inisiatif pertahanan yang diberi nama *Vientiane Vision 2.0*. *Vientiane Vision 2.0* dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari *Vientiane Vision* yang pertama. Inisiatif tersebut akan berupaya untuk memperdalam kerja sama pertahanan ASEAN-Jepang dengan meningkatkan keamanan regional dengan memfokuskan kerja sama dalam memastikan supremasi hukum, memperkuat keamanan maritim, dan menghadapi ancaman non-tradisional (Parameswaran, *Vientiane Vision 2.0 Puts Japan's Asia Security Role into Focus*, 2019).

Vientiane Vision menghadirkan tiga prinsip kerja sama pertahanan Jepang dan ASEAN yaitu pertama kerja sama dari hati ke hati dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ASEAN, menghargai hubungan antar masyarakat dan mendengarkan dengan tulus kebutuhan mitra.

Kedua, kerja sama yang disesuaikan dan berkelanjutan dengan mengejar hasil yang berkelanjutan melalui keterlibatan yang terencana dengan baik, transparan dan berkelanjutan. Ketiga, kerja sama yang setara dan terbuka dengan mengejar kerjasama internasional yang luas yang mendukung sentralitas, persatuan dan ketahanan ASEAN (Ministry of Defense of Japan, 2022). Dari prinsip ini, kita ketahui bersama bahwa dalam menyikapi berbagai persoalan di kawasan Indo-Pasifik, Jepang turut mendukung dan menghargai prinsip-prinsip ASEAN.

Adanya komitmen baik dari negara-negara ASEAN dan Jepang dalam sinergi AOIP dengan FOIP dapat mendukung terciptanya kawasan Indo-Pasifik yang aman, damai, stabil, sekaligus usaha untuk meminimalisir peluang terjadinya konflik antar negara. Terciptanya kesepakatan atau komitmen kerja sama pertahanan antara ASEAN dan Jepang menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan terutama bagi Indonesia telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran pada dimensi kerja sama strategis.

Sinergi AOIP dan FOIP sebagai *Promoting Democratic Civil-Military Relations*

Sinergi AOIP dengan FOIP dilakukan untuk mempromosikan hubungan demokrasi antara sipil dan militer. Pada dasarnya kedua konsep telah mendukung nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaannya. Dalam berbagai kegiatan kerja sama melibatkan Kementerian Pertahanan yang merupakan representasi dari pengendalian sipil terhadap militer. Kemudian sinergi AOIP dengan FOIP juga dilakukan untuk mendorong nilai-nilai demokrasi di kawasan Indo-Pasifik. Kedua konsep sama-sama memiliki visi untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik bebas dan terbuka untuk semua pihak tanpa terkecuali. Salah satu yang termasuk dalam mendorong nilai demokrasi adalah mendukung *freedom of navigation* atau kebebasan navigasi.

Kebebasan navigasi merupakan konsep dalam tatanan masyarakat internasional dengan kaitannya dalam menjalin hubungan luar negeri, dimana wilayah tersebut merupakan kawasan yang dapat dilintasi oleh setiap negara (tanpa izin) untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan tetap memperhatikan hukum internasional yang berlaku (Bahri, 2020). Kebebasan navigasi merupakan salah satu prinsip dalam hukum internasional, dimana peraturan tentang hukum laut ini hadir sebagai pencegahan dan penghapusan segala tindakan yang membahayakan manusia serta menegakkan perdamaian dan keamanan diatas laut. Wilayah yang dapat digunakan sebagai jalur kebebasan navigasi adalah kawasan yang

menjadi rute utama dalam menjalin hubungan lintas negara dengan terhindar dari segala kemungkinan intervensi atau pengaruh negara disekitarnya. Dengan menjamin kebebasan navigasi berarti memberikan tanggung jawab kepada suatu negara untuk memberikan keamanan maritim bagi negara-negara yang melintasinya.

Sebagian besar wilayah Indo-Pasifik adalah wilayah laut. Perairan di kawasan Indo-Pasifik merupakan salah satu jalur terpadat bagi lalu lintas perdagangan dunia, pelayaran, dan penerbangan internasional. Menciptakan keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik merupakan hal yang sangat penting. ASEAN dan Jepang telah berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan kestabilan kawasan termasuk di wilayah maritim. Upaya-upaya yang dilakukan ASEAN dan Jepang dalam mendukung kebebasan navigasi diantaranya dengan menciptakan rasa aman di laut dan menegakan hukum internasional. ASEAN dan Jepang melakukan hubungan dialog melalui berbagai mekanisme (ASEAN, 2021).

Sinergi AOIP dan FOIP sebagai *Enhancing Peacekeeping Capabilities*

Sinergi AOIP dengan FOIP juga digunakan untuk pengembangan kapabilitas perdamaian. Perdamaian kawasan merupakan hal yang diinginkan oleh semua pihak. Dengan adanya perdamaian, manusia dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Negara juga dapat mencapai kepentingan nasionalnya dengan mudah tanpa adanya gangguan. Oleh karena itu, sinergi AOIP dengan FOIP salah satu tujuannya adalah untuk pengembangan kapabilitas perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Upaya perdamaian melalui kerja sama pertahanan yang didasari pada proses *confidence building* atau membangun rasa saling percaya. Sama halnya dengan *strategic engagement*, pembangunan kapabilitas perdamaian juga sangat memerlukan rasa saling percaya antar pihak.

Dalam meningkatkan kapabilitas perdamaian di kawasan, Jepang sudah menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) sejak tahun 2004. TAC merupakan Perjanjian Persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara. Dengan menandatangani TAC tersebut merupakan Langkah awal Jepang untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Disepakatinya Outlook ASEAN oleh negara-negara ASEAN dan dikeluarkannya visi FOIP oleh Jepang juga merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan kapabilitas perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Kemudian adanya kesepakatan untuk menyinergikan kedua konsep tersebut juga merupakan salah satu wujud dari peningkatan

kapabilitas perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Dengan adanya kesepakatan untuk bersinergi, menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN dan Jepang saling percaya satu sama lain.

Tantangan yang Dihadapi dalam Sinergi ASEAN Outlook on Indo-Pacific dan Free and Open Indo-Pacific Jepang

Setiap melakukan setiap kegiatan tentu terdapat kendala atau rintangan yang dihadapi. Termasuk dalam melakukan sinergi *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* dan *Free and Open Indo-Pacific* Jepang. Dalam wawancara dengan Rizerius Eko Hadisancoko selaku praktisi dalam bidang pertahanan menyebutkan bahwa negara-negara memiliki konsep sendiri terkait kawasan Indo-Pasifik. Berbagai macam konsep mengenai kawasan Indo-Pasifik ini tentu memiliki perbedaan atau ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu dari beberapa konsep dalam memandang memiliki beberapa kesamaan. Yang paling mutlak yaitu terciptanya kawasan Indo-Pasifik yang aman. Sehingga karena aman itu dapat melakukan perdagangan internasional. Oleh karena itu muncul keinginan bersama untuk bekerjasama menciptakan keamanan, sehingga kapal-kapal dagang yang melewati rute laut tersebut terjamin keamanannya. Beliau juga menyebutkan bahwa di antara konsep-konsep yang ada tentang kawasan Indo-Pasifik, milik ASEAN, Jepang, India, AS, dan Australia ada kemiripan yaitu bagaimana mengelola halaman Indo-Pasifik bersama untuk kepentingan bersama. Namun di sisi lain, pihak Cina agak kekeh mengklaim khususnya wilayah yang masuk ke kawasan Indo-Pasifik yang arahnya dari LCS merupakan bagian dari negaranya.

Kemudian hasil wawancara dengan Makarim Wibisono menjelaskan bahwa apabila dilihat dari AOIP, ASEAN menginginkan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang inklusif, jadi semua aktor atau negara bisa masuk. Namun gagasan Indo-Pasifik yang dimiliki QUAD (Jepang, AS, Australia, dan India) termasuk Jepang di dalamnya, menginginkan kawasan Indo-Pasifik hanya untuk kelompok negara yang *inbehavior* pada prinsip-prinsip demokrasi, tidak termasuk Cina. Yang diharapkan yaitu bagaimana QUAD atau AUKUS lebih inklusif tidak hanya eksklusif. Meskipun, saat ini ada indikasi bahwa strategi FOIP Jepang yang saat ini telah menjadi sebuah visi sudah mulai terbuka bagi negara manapun, termasuk Cina. Namun keterbukaan ini baru sebatas dalam hubungan ekonomi saja, sedangkan dalam hubungan keamanan dan pertahanan belum ada tanda-tanda terbuka. Hubungan ekonomi Jepang dan Cina dalam keadaan yang baik mengingat ekonomi Jepang sangat bergantung dengan Cina.

Kemudian kendala yang lain yaitu kendala eksternal yang dialami dalam pelaksanaan sinergi AOIP dengan FOIP yaitu adanya pandemi COVID-19. Kemunculan pandemi ini, menghambat pergerakan aktivitas manusia dan barang antar negara. Sehingga beberapa pertemuan, seminar, pelatihan yang seharusnya dilakukan secara langsung antara ASEAN dengan Jepang harus dilaksanakan secara *online*.

KESIMPULAN

Kawasan Indo-Pasifik memiliki lingkungan strategis yang penting bagi negara-negara di dalam dan di luar kawasan. Berbagai negara dan organisasi internasional telah mengeluarkan kebijakan luar negerinya terhadap kawasan ini. Negara-negara Asia Tenggara yang diwakili oleh ASEAN mengeluarkan AOIP untuk menyikapi situasi di kawasan ini. Sedangkan Jepang mengeluarkan strategi FOIP. Sinergi kedua konsep bertujuan untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang aman dan stabil. *Joint Statement of the 23rd ASEAN-Japan Summit on Cooperation on ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* pada tahun 2020 menjadi landasan kerjasama ASEAN dan Jepang dalam menyikapi perkembangan isu di kawasan Indo-Pasifik. Dalam melakukan sinergi tersebut terdapat beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi. Tantangan diantaranya kegigihan Cina dalam mengeklaim wilayah di LCS dan LCT. Klaim yang disertai dengan pengerahan militer di kawasan tersebut membuat situasi di kawasan Indo-Pasifik semakin tidak stabil. Tantangan yang kedua yaitu perbedaan konsep antara AOIP dengan FOIP Jepang, dimana AOIP lebih inklusif termasuk kepada Cina. Sedangkan FOIP Jepang dan negara-negara QUAD masih terbatas pada negara-negara yang demokratis saja. Namun belakangan ini, sejak Jepang mengubah konsep FOIP dari sebuah strategi menjadi visi, Jepang mulai terbuka terhadap Cina dalam bidang ekonomi.

Penelitian lanjutan terkait kawasan Indo-Pasifik, dan bagaimana upaya negara-negara di luar dan di dalam kawasan menghadapi situasi kawasan perlu dilakukan. Selain itu penelitian terkait implementasi sinergi AOIP dan FOIP dalam berbagai forum juga perlu dilakukan guna menambah wawasan tentang sejauh mana ASEAN dan Jepang berhasil melakukan sinergi guna menghadapi situasi kawasan. Harapannya dengan adanya penelitian lanjutan tentang topik ini, negara-negara dapat melihat situasi dan ancaman di kawasan dengan lebih jelas.

Negara-negara juga dapat mengatasi kendala yang ada dilapangan agar dapat melindungi kepentingan nasional mereka di kawasan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmawati, Triana dkk. (2014). Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di. *Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya dengan Vol 2, No 4, 641-647.*
- ASEAN. (2019, June). *ASEAN Outlook on Indo-Pasific*. Retrieved from Association Southeast Asian Nations: https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf
- ASEAN. (2020, 11 13). *Joint Statement of the 23rd ASEAN-Japan Summit on Cooperation on ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Retrieved from ASEAN: <https://asean.org/joint-statement-of-the-23rd-asean-japan-summit-on-cooperation-on-asean-outlook-on-the-indo-pacific-2/>
- ASEAN. (2021, Agustus). *Joint Statement of The 23rd ASEAN Japan Summit on Cooperation on ASEAN Outlook on Indo-Pasific*. Retrieved from ASEAN: <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/Joint-Statement-of-the-23rd-ASEAN-Japan-Summit-on-Cooperation-on.pdf>
- ASEAN. (2021, 06 14). *Overview of ASEAN-Japan Dialogue Relations*. Retrieved from Association of Southeast Asian Nations: https://asean.org/wp-content/uploads/20210614_Overview-ASEAN-Japan-Relations-full-version.pdf
- Bahri, M. (2020). Kebijakan Freedom of Navigation Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan. *WANUA : Jurnal Hubungan Internasional univerrsitias Hasanuddin, Volume 5 No. 2. Desember 2020, 132.*
- Barry Buzan & Ole Wavier. (2003). *Regions and Powers the Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Barston, R. (2014). *Modern Diplomacy*. (Fourth). Routledge.
- Berridge, G. R., & Lloyd, L. (2012). Diplomacy. In *In The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy (3rd ed., p. 98)*. Palgrave Macmillan.
- Breslin, S. (2010). *Regions and Regionalism in World Politics*. New York: Palgrave.
- BRIN. (2021, Juli 11). *Peran Kerja sama Jepang-ASEAN dalam Kancah Indo-Pasifik*. Retrieved from Organisasi Riset Ilmu Sosial dan Humaniora badan Riset dan Inovasi Nasional: <https://ipsh.brin.go.id/2021/07/11/peran-kerja-sama-jepang-asean-dalam-kancah-indo-pasifik/>
- Catherine Marshal dan Gretchen B. Rossman. (1995). *Designing Qualitative Research*. California: Sage Publications.
- Cheyre, J. E. (2013). *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford university Press chapter Defense Diplomacy.
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Role for Military Cooperation and Assistance*. New York: Oxford University Press inc.

- Covey, S. (1989). *The Seven Habits of Highly Effective People*. New York: Simon and Schuster.
- Hampden-Turner, C. (1990). *Charting the Corporate Mind: Graphic Solutions to Business*. New York: The Free Press.
- Japan Ministry of Defense. (2020, July). *Achieving the Free and Open Indo Pasific (FOIP) Vision Japan Ministry Of Defense's Approach*. Retrieved from Japan Ministry of Defense: https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2019/pdf/20190801_e.pdf
- Joseph S. Nye, J. (2005). *Soft Power The Means to Succes in World Politics*. Public Affairs.
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (n.d.). *Ekonomi dan Industri*. Retrieved from Kedutaan Besar Jepang di Indonesia: https://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_15.html
- Kemlu RI. (2019, 06 28). *Menlu Jepang sambut baik Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik dan hargai kepemimpinan Indonesia di kawasan*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/405/berita/menlu-jepang-sambut-baik-outlook-asean-mengenai-indo-pasifik-dan-hargai-kepemimpinan-indonesia-di-kawasan#!>
- Kemlu RI. (2022, 08 04). *ASEAN-Japan Ministerial Meeting: Kerja Sama Konkrit di Indo-Pasifik Perlu Diperkuat*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia : <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3879/view/asean-japan-ministerial-meeting-kerja-sama-konkrit-di-indo-pasifik-perlu-diperkuat>
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE.
- Ministry of Defense of Japan. (2016, 11). *Vientiane Vision: Japan's Defense Cooperation Initiative with ASEAN*. Retrieved from Ministry of Defense of Japan: https://www.mod.go.jp/en/d_act/exc/vientianevision/index.html
- Ministry of Defense of Japan. (2022). *Defense of Japan 2022*. Retrieved from Ministry of Defense of Japan: https://www.mod.go.jp/en/publ/w_paper/index.html
- Ministry of Defense of Japan. (2022). *Vientiane Vision 2.0*. Retrieved from Ministry of Defense of Japan: https://www.mod.go.jp/en/d_act/exc/admm/06/vv2_en.pdf
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2022, Mei 16). *Foreign Policy*. Retrieved from Free and Open Indo-Pacific: https://www.mofa.go.jp/policy/page25e_000278.html
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- OEC. (2020). *Japan*. Retrieved from OEC: <https://oec.world/en/profile/country/jpn#monthly-trade-latest-trends>
- Parameswaran, P. (2019, 10 19). *Vientiane Vision 2.0 Puts Japan's Asia Security Role into Focus*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2019/11/vientiane-vision-2-0-puts-japans-asia-security-role-into-focus/>
- Parameswaran, P. (2019, 19 11). *Vientiane Vision 2.0 Puts Japan's Asia Security Role into Focus*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2019/11/vientiane-vision-2-0-puts-japans-asia-security-role-into-focus/>

- Purwaka, I. F. (2018). *Skripsi Upaya Jepang Dalam Proses Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Tentang Kebijakan Pasifisme dan Dukungan Amerika Serikat Periode 2012-2016*. Jakarta: Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Roza, R. (2019). Pandangan ASEAN Terhadap Indo-Pasifik. *Info Singkat Vol. XI, No.12/II/Puslit/Juni/2019*, 9.
- Sahashi, R. (2019). The Indo-Pacific in Japan's Foreign Policy. *Center For Strategic & International Studies*, 1-11.
- Sudo, S. (1988). Japan-ASEAN Relations: New Dimensions in Japanese Foreign Policy. *Asian Survey Vol. 28, No. 5 (May, 1988)*, 512-515.
- The Department of Defense. (2019). *Indo Pasific Strategy Report Preparadness, Partnership, and Promoting Networked Region*. Retrieved from The Department of Defense: <https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF>
- Winger, G. (2014). The Velvet Gauntlet : A Theory of Defense Diplomacy What Is Defense Diplomacy ? In A. Lisiak & N. Smolenski (Eds.), *What Do Ideas Do? IWM Junior Visiting Fellows' Conferences*, (pp. 1-15).